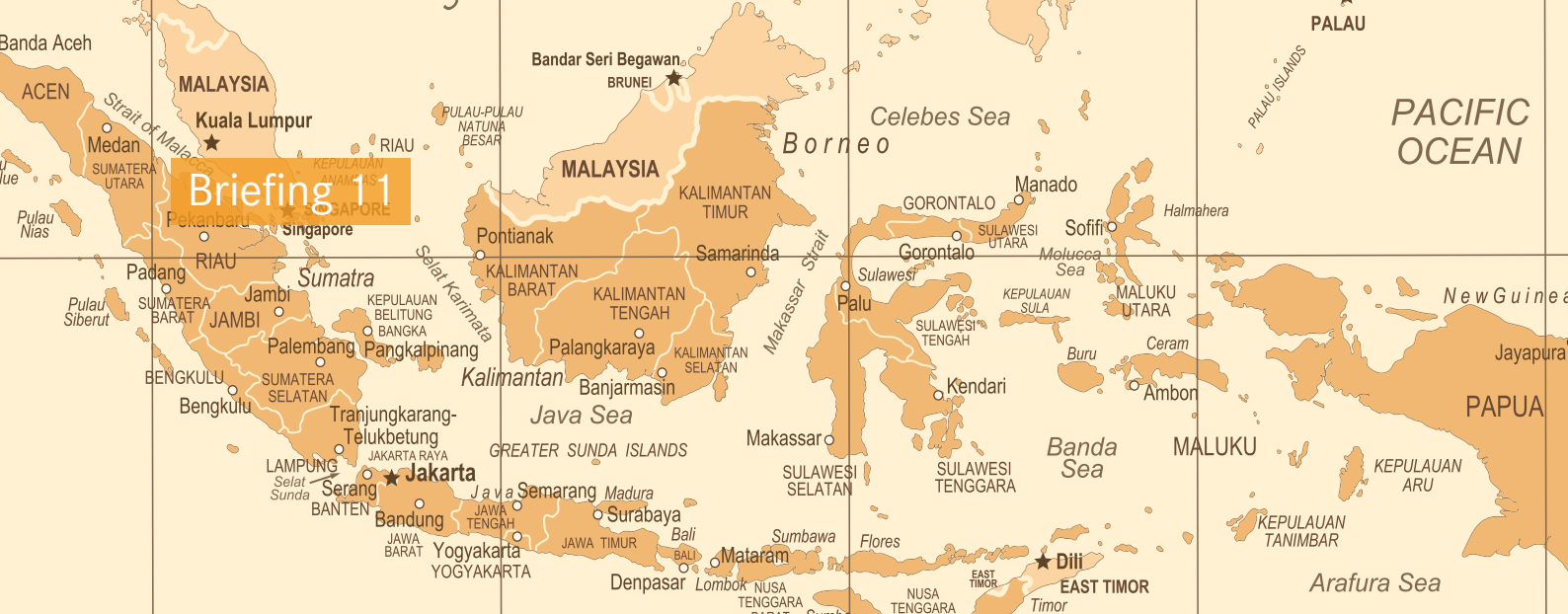




Inisiatif Terpercaya

Model untuk mendapatkan minyak sawit dari yurisdiksi berkelanjutan di Indonesia

Ringkasan

- Dengan meningkatnya tekanan dari konsumen, masyarakat sipil, serta peraturan, perusahaan barang konsumen dan pelaku rantai pasokan lain semakin terdorong untuk mendapatkan minyak sawit yang diproduksi secara legal dan bebas deforestasi.
- Ruang lingkup sistem sertifikasi keberlanjutan yang terbatas berarti bahwa langkah-langkah pelengkap untuk memverifikasi legalitas dan keberlanjutan minyak sawit diperlukan.
- Pendekatan Terpercaya menawarkan solusi di tingkat kabupaten yang dapat ditingkatkan untuk menilai keberlanjutan produksi komoditas sesuai dengan indikator lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan tata kelola.
- Uraian singkat ini membahas cara sistem Terpercaya mengidentifikasi dan mengurangi risiko deforestasi dan risiko legalitas, menyederhanakan keterlacakan, membantu perusahaan dalam memenuhi persyaratan uji tuntas dan memfasilitasi pengadaan (sourcing) secara berkelanjutan.

Pendahuluan

Upaya untuk mengurangi deforestasi dan degradasi lingkungan hidup akibat produksi komoditas perkebunan membebankan tanggung jawab yang lebih besar pada perusahaan barang konsumsi dan pelaku rantai pasokan lainnya untuk memastikan bahwa komoditas yang dihasilkan adalah legal dan bebas deforestasi. Perusahaan multinasional besar seringkali berada di posisi yang paling tepat untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko deforestasi dalam rantai pasokan komoditas, tetapi aktor yang lain tidak selalu memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Untuk menilai risiko, perusahaan perlu mengakses informasi tentang area produksi sumber pasokan komoditas mereka (misalnya kebun atau konsesi), serta tentang legalitas dan keberlanjutan produksi.

Dalam hal komoditas dengan rantai pasok yang kompleks dan memiliki banyak produk turunan, seperti minyak sawit, perusahaan seringkali mengambil bahan dari banyak sumber produsen individu melalui perusahaan perantara dan tautan rantai pasok informal, sehingga keterlacakan menjadi sulit dan berbiaya tinggi. Untuk meyakinkan perusahaan-perusahaan tentang keberlanjutan dan legalitas komoditas, telah dibuat skema sertifikasi rantai pasok berkelanjutan seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil. Kendati demikian, mengingat bahwa cakupan skema-skema tersebut adalah terbatas, diperlukan solusi yang saling melengkapi, dapat diskalakan, dan hemat biaya.

Sejumlah pendekatan yurisdiksi terhadap produksi komoditas telah diusulkan sebagai solusi skala besar untuk menciptakan insentif dan menunjukkan produksi yang berkelanjutan dan inklusif dari semua komoditas dalam satu unit administratif pemerintah tunggal. Yurisdiksi subnasional, seperti kabupaten, kotamadya, negara bagian atau provinsi, mencakup seluruh wilayah dan hutan serta para produsen komoditas di dalamnya. Oleh karena itu, keberlanjutan yurisdiksi menawarkan peluang untuk meningkatkan secara substantif perlindungan lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial pada skala besar.

Yurisdiksi subnasional¹ bersifat sangat heterogen dan manfaat serta tantangan pendekatan yurisdiksi belum sepenuhnya diperhitungkan dalam model rantai pasok. Manfaat dari pengambilan sumber bahan berdasarkan yurisdiksi dapat berupa, antara lain, mengurangi biaya dalam pencapaian komitmen lingkungan hidup, sosial dan tata kelola perusahaan; mengurangi biaya dan kompleksitas proses uji tuntas; dan memberi insentif pada produksi berkelanjutan di seluruh yurisdiksi dan sektor.

Dalam uraian singkat ini, pertama-tama dibahas tentang bagaimana sistem Terpercaya dapat digunakan untuk memfasilitasi pengadaan (sourcing) preferensial dari kabupaten yang berkelanjutan dan bebas deforestasi. Kedua, kami mencermati cara bagaimana hal tersebut dapat membantu menunjukkan bahwa komoditas yang bersumber dari kabupaten-kabupaten ini legal dan bebas deforestasi, dan bagaimana dapat diberikan jaminan terkait pernyataan produksi legal dan bebas deforestasi. Ketiga, kami membahas langkah-langkah pelengkap potensial untuk menyederhanakan proses uji tuntas operator dan mempertahankan akses pasar bagi produsen yang berkelanjutan dan bebas deforestasi yang berlokasi di yurisdiksi yang tidak berkinerja baik.



▲
Penggunaan pendekatan yurisdiksi dapat membantu memantau tingkat risiko deforestasi dan keberlanjutan

Jurisdictional sourcing [Pengambilan/pengadaan bahan sumber dari yurisdiksi]: Definisi kerja

Meskipun merupakan konsep yang relatif baru, jurisdictional sourcing (pengambilan/pengadaan bahan sumber dari yurisdiksi) telah dibahas dalam berbagai artikel.² Salah satu uraian jurisdictional sourcing di tahun 2016 adalah sebagai berikut:

"Perusahaan menilai akuntabilitas untuk memenuhi tujuan mereka pada skala yurisdiksi, mungkin juga memasukkan sertifikasi yurisdiksi (sertifikasi semua produksi dari yurisdiksi yang dinilai memenuhi standar apabila kriteria kinerja skala yurisdiksi telah terpenuhi), dan mereka memilih untuk mengambil/mengadakan setidaknya sebagian produk berdasarkan keberadaan dan keberhasilan pendekatan yurisdiksi berbasis tempat."³

Dalam diskusi yang berlangsung akhir-akhir ini jurisdictional sourcing digambarkan sebagai berikut:

"Hibrida yang muncul akhir-akhir ini antara pendekatan yurisdiksi pengelolaan penggunaan lahan dan strategi rantai pasok berbasis produsen atau sektoral untuk memberikan insentif berbasis pasar untuk produksi komoditas bebas deforestasi."⁴

Dalam definisi terakhir, penekanan diberikan pada tindakan kolektif di antara para produsen satu atau lebih komoditas, dan setelah semua produsen memenuhi standar yang ditentukan, dimungkinkan adanya jurisdictional sourcing:

"Kuncinya adalah bahwa para produsen di yurisdiksi tertentu terikat bersama pada reputasi kolektif sehingga jika salah satu produsen terlibat dalam deforestasi yang tidak diizinkan, seluruh yurisdiksi tersebut tidak lagi disertifikasi. Secara teoritis, hal tersebut memberikan insentif bagi pemerintah dan/atau sesama produsen untuk mengembangkan kebijakan, menciptakan "mekanisme pemulihan" dan melaksanakan perjanjian untuk menjaga reputasi yurisdiksi mereka."⁵

Dalam uraian singkat ini, definisi-definisi ini dibangun melalui beberapa cara. Pertama, kami menggunakan kabupaten Indonesia sebagai satuan untuk mengukur kinerja sosial, lingkungan hidup, ekonomi dan tata kelola. Sistem tidak menentukan cara suatu kabupaten meningkatkan kinerjanya, sehingga dimungkinkan adanya inovasi dan pengelolaan adaptif di tingkat yurisdiksi. Kedua, kami tidak berpendapat bahwa semua produsen berperilaku secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, atau berkontribusi secara setara terhadap kinerja yurisdiksi; kami berpendapat bahwa hal ini seharusnya tidak merusak reputasi para pelaku yang telah melakukan semua itu dengan baik. Sehubungan dengan itu, diusulkan cara agar perusahaan yang menyebabkan kerusakan sosial atau lingkungan dikecualikan atau dimasukkan ke daftar hitam.

Oleh karena itu, kami mendefinisikan jurisdictional sourcing sebagai berikut:

Pengambilan bahan dari sumber preferensial komoditas yang diproduksi di yurisdiksi yang memenuhi serangkaian kriteria keberlanjutan dengan mempertimbangkan informasi pelengkap relevan di tingkat produsen yang diakui di pasar yang relevan dan informasi relevan lainnya tentang produsen.

Meskipun jurisdictional sourcing bergantung pada pengukuran keberlanjutan di tingkat yurisdiksi, transaksi cenderung tetap dilakukan berdasarkan perusahaan-ke-perusahaan. Sebagai contoh, dalam dokumen kerangka kerjanya untuk pendekatan yurisdiksi terhadap sertifikasi, RSPO mengusulkan entitas (institusi) tingkat yurisdiksi untuk sertifikasi.⁶ Dalam model ini, perusahaan berbagi tanggung jawab kolektif, dengan dukungan dari pemerintah daerah yang menyediakan lingkungan yang mendukung. Namun, perusahaan masih berdagang secara individu, yaitu, berdasarkan perusahaan, koperasi atau usaha desa.

Di bagian berikutnya, kami membahas bagaimana sistem jurisdictional sourcing yang diusulkan dapat membantu perusahaan memenuhi persyaratan pasokan komoditas legal dan bebas deforestasi.

Terpercaya: Memantau kinerja keberlanjutan dan mengidentifikasi risiko di tingkat kabupaten

Memberikan insentif untuk keberlanjutan kabupaten

Platform data Terpercaya adalah instrumen untuk memantau kinerja kabupaten-kabupaten di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan tata kelola, untuk mendukung transisi menuju keberlanjutan. Sebanyak 23 indikator tersebut mencerminkan dan menafsirkan unsur-unsur keberlanjutan sesuai dengan kerangka hukum Indonesia, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB dan Kontribusi Indonesia yang Ditentukan Secara Nasional berdasarkan Perjanjian Paris. Dengan demikian, produksi komoditas yang berkelanjutan, legal, dan bebas deforestasi dapat diukur dan dievaluasi di tingkat kabupaten melalui cara-cara yang sah dan disepakati secara luas (Gambar 1).

Gambar 1: Keberlanjutan diukur di tingkat kabupaten

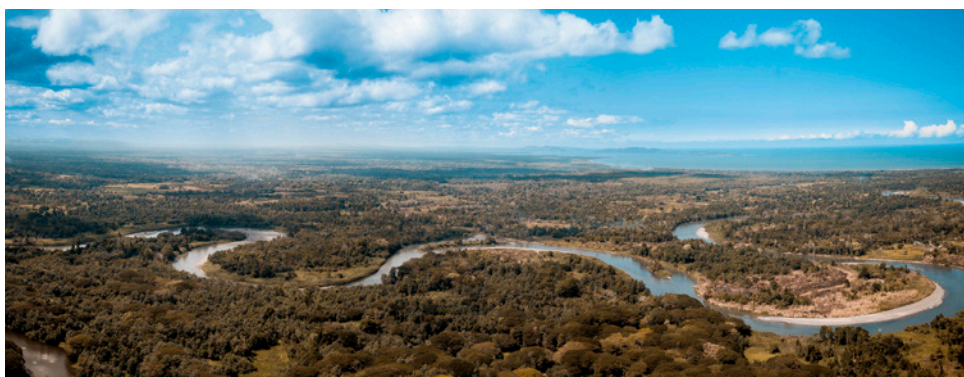


Sebagai sistem nasional yang didasarkan pada data yang dikumpulkan secara sistematis pada tingkat kabupaten, Terpercaya memungkinkan identifikasi kabupaten yang maju menuju dan mencapai keberlanjutan berdasarkan ambang batas yang ditentukan. Indikator dapat memberikan informasi tentang risiko deforestasi dan/atau ilegalitas terkait produksi komoditas, dan apakah terdapat perbaikan atau tidak. Dengan demikian, sistem Terpercaya dapat memberikan insentif kepada kabupaten-kabupaten untuk meningkatkan kinerja mereka sebagai sarana untuk menarik investasi dan menarik pembeli yang mencari komoditas yang diproduksi secara berkelanjutan, baik ketika permintaan didorong oleh ketentuan peraturan atau komitmen perusahaan.

Menyederhanakan uji tuntas

Dalam sebagian besar model tanggung jawab korporasi, pada akhirnya perusahaan, baik pembeli komoditas hilir atau langsung, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rantai pasokan mereka legal dan bebas deforestasi. Sejumlah perusahaan multinasional memiliki sumber daya dan kemampuan untuk melakukan uji tuntas⁷ mengenai keberlanjutan dan legalitas budidaya, pemanenan dan ekstraksi. Namun, tidak demikian halnya dengan sebagian besar perusahaan. Oleh karena itu, implementasi proses uji tuntas secara luas berdasarkan peraturan yang diberlakukan di pasar global dapat memperoleh manfaat dari informasi sumber pihak ketiga termasuk pemerintah, entitas swasta, dan organisasi masyarakat sipil.

Platform data Terpercaya, sebagai sistem yang di-hosting pemerintah dan dapat diakses secara publik, memiliki potensi untuk memberikan informasi kepada perusahaan tentang deforestasi kabupaten dan risiko legalitas. Dalam hal risiko yang rendah, terdapat persyaratan yang lebih longgar untuk informasi tingkat produsen sehingga sumber daya dapat dialokasikan untuk meningkatkan uji tuntas dan dukungan perbaikan di wilayah yang menghadirkan risiko terbesar. Pendekatan yang demikian juga dapat memberikan kesempatan bagi petani independen di kabupaten berisiko rendah deforestasi untuk mempertahankan akses ke rantai pasok minyak sawit berkelanjutan di mana, misalnya, tantangan administratif dan/atau logistik mencegah adanya penyelesaian jangka pendek atas masalah legalitas kepemilikan tanah petani kecil.



Menunjukkan bahwa rantai pasokan komoditas bebas dari deforestasi memerlukan akses ke informasi untuk menginformasikan proses uji tuntas

Foto: Freepik.com

Tanggung jawab geografis versus tanggung jawab kelompok

Berbagai upaya yang dilakukan saat ini untuk mempromosikan rantai pasok yang berkelanjutan dan bertanggung jawab tidak hanya mempertimbangkan perusahaan produsen dan wilayah produksi, tetapi juga praktik keberlanjutan perusahaan induk dan afiliasi. Produsen yang disertifikasi menurut RSPO atau Forest Stewardship Council (FSC), di antara berbagai skema sertifikasi lainnya, telah dimintai pertanggungjawaban atas praktik anak perusahaan atau perusahaan afiliasi.⁸ Akhir-akhir ini, keterlibatan perusahaan induk di sektor lain seperti pertambangan, juga telah digunakan untuk mempertanyakan pernyataan tentang keberlanjutan produksi komoditas pertanian.⁹ Meskipun ini menunjukkan promosi akuntabilitas yang lebih luas, hal ini dapat mengurangi tindakan positif yang diambil di lokasi atau kontribusi tertentu untuk produksi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di tingkat yurisdiksi, dan oleh karena itu, interaksi antara tanggung jawab geografis dan tanggung jawab kelompok perlu didefinisikan lebih lanjut.

Sistem yang didasarkan pada keberlanjutan tingkat yurisdiksi dapat membantu memastikan inklusi pekebun kecil

Foto: Miguel Pinheiro, CIFOR



Mengidentifikasi produsen berkinerja dan tidak berkinerja dalam yurisdiksi berisiko tinggi dan rendah serta yurisdiksi lainnya

Tidak ada jaminan bahwa setiap produsen (petani kecil, pemegang konsesi) atau pelaku hilir (pabrik, pengolah) yang berada di kabupaten yang memenuhi ambang batas berkelanjutan atau bebas deforestasi memproduksi dan akan terus memproduksi komoditas secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Perusahaan yang mengambil bahan dari sumber di kabupaten-kabupaten tersebut, terutama perusahaan hilir, kemungkinan tidak memiliki informasi yang cukup tentang produsen individual untuk membuat keputusan mengenai kepatuhan terhadap standar lingkungan hidup dan sosial. Dalam hal ini pendaftaran perusahaan produsen dan perusahaan hilir yang mematuhi dan tidak mematuhi standar lingkungan hidup dan sosial di suatu kabupaten memainkan peranan. Pendaftaran yang demikian dapat didukung oleh pemerintah kabupaten dan dipantau secara independen untuk memberikan transparansi dan memperkuat akuntabilitas dan kredibilitas.

Sebaliknya, produsen yang bertanggung jawab dan berkelanjutan mungkin berada di kabupaten yang tidak berisiko rendah. Produsen tersebut mungkin tidak memiliki sumber daya atau kekuatan untuk memengaruhi keberlanjutan di seluruh kabupaten, tetapi dapat diberikan akses ke rantai pasok yang berkelanjutan dan bebas deforestasi berdasarkan sertifikasi dan/ atau informasi lain yang disepakati oleh para pelaku rantai pasok dan sesuai dengan ketentuan peraturan. Dengan demikian mereka mungkin memerlukan jalur lain untuk mengakui dan memberi insentif pada keberlanjutan mereka. Kriteria dan bukti yang diperlukan harus disepakati oleh para pelaku rantai pasok, dan langkah-langkah peraturan pendukung dapat diterapkan di negara produsen dan/atau negara konsumen.

Usulan untuk menyederhanakan uji tuntas

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Terpercaya dapat memfasilitasi jurisdictional sourcing sebagaimana yang diuraikan di Gambar 2. Dalam model ini, para operator melakukan uji tuntas yang disederhanakan di kabupaten-kabupaten berisiko rendah yang teridentifikasi. Fleksibilitas platform data Terpercaya memungkinkan dimasukkannya definisi-definisi khusus kabupaten berisiko rendah dan perusahaan yang tidak berkinerja/masuk daftar hitam.

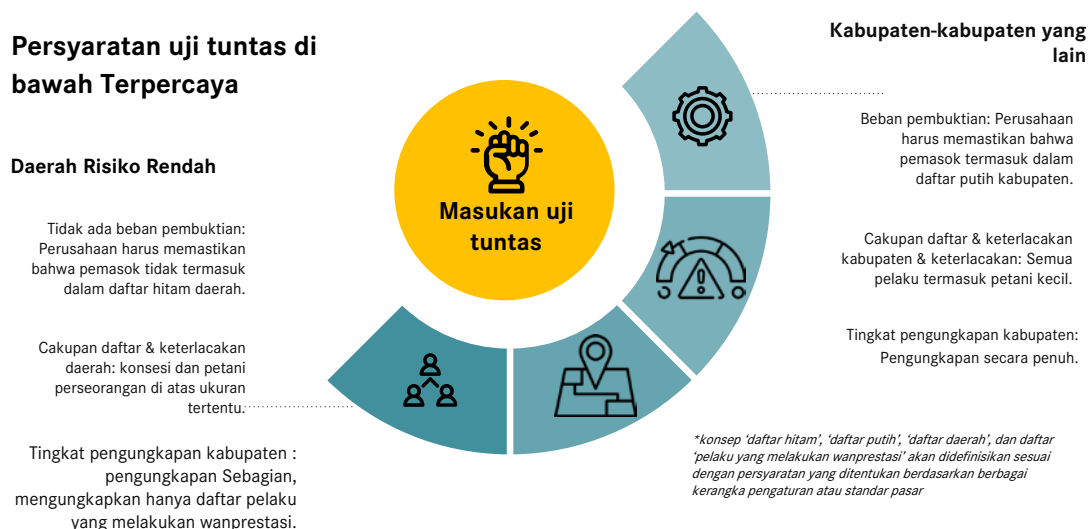
Mendefinisikan risiko rendah di tingkat kabupaten

Untuk tujuan pengadaan komoditas, sistem Terpercaya dapat mengidentifikasi kabupaten risiko rendah dan kabupaten lainnya. Seiring waktu, tujuannya adalah untuk mendorong semua kabupaten untuk memenuhi syarat sebagai kabupaten risiko rendah dengan membangun visibilitas pasar sebagai pendorong perubahan positif. Sistem tersebut memungkinkan kepada perusahaan menentukan tingkat risiko sosial dan lingkungan hidup yang dapat diterima di tingkat nasional, provinsi atau kabupaten sesuai dengan ambang batas yang ditetapkan untuk masing-masing indikator atau kelompok indikator. Ambang batas dapat didasarkan pada ketentuan peraturan domestik dan komitmen internasional, standar sertifikasi sukarela atau wajib, dan / atau kebutuhan individual dari pembeli.

Tingkat risiko dapat didefinisikan pula sesuai dengan peraturan di pasar konsumen global yang mengatur ketentuan uji tuntas untuk operator yang memasarkan produk di pasar yang relevan. Berbagai tingkat risiko yang berbeda dapat dikaitkan dengan berbagai tingkat uji tuntas diperlukan yang berbeda pula. Pengaturan yang demikian dapat memberi insentif kepada kabupaten untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi risiko terkait indikator utama, sebagai contoh, mengenai deforestasi terkait komoditas. Kemungkinan rumusan untuk kewajiban yang berbeda tersebut dibahas di bawah ini.

Gambar 2. Usulan peran Terpercaya dalam memfasilitasi jurisdictional sourcing

Sourcing dalam Yurisdiksi



Sumber informasi uji tuntas: daftar putih dan daftar hitam kabupaten

Perusahaan perlu memberikan bukti tertentu untuk membuktikan bahwa pemasok mereka memproduksi komoditas secara berkelanjutan. Tingkat pembuktian yang diperlukan bervariasi dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Di sini kami mengusulkan bahwa di kabupaten berisiko rendah, perusahaan yang membeli dari kabupaten tersebut hanya perlu menunjukkan bahwa pemasok tidak ada dalam daftar hitam perusahaan. Sebaliknya, untuk kabupaten lain, perusahaan perlu menunjukkan bahwa pemasok mereka ada dalam daftar putih kabupaten, yang mungkin memerlukan lebih banyak tindakan untuk memastikan bahwa pemasok memberikan informasi yang diperlukan atau membuat perubahan untuk masuk ke dalam daftar putih. Konsep daftar hitam dan daftar putih secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Daftar hitam kabupaten:** Daftar yang disusun oleh pemerintah daerah mengidentifikasi perusahaan yang tidak berkinerja sesuai dengan standar yang diharapkan sehubungan dengan legalitas atau keberlanjutan. Daftar tersebut dapat mencakup perusahaan yang terus membuka kawasan hutan di dalam konsesi mereka, perusahaan yang memiliki konsesi yang tumpang tindih dengan kawasan hutan, atau perusahaan yang saat ini terkena proses hukum pidana atau perdata. Daftar hitam ini diperlukan di kabupaten yang didefinisikan sebagai risiko rendah.
- **Daftar putih kabupaten:** Daftar yang disusun oleh pemerintah daerah mengidentifikasi perusahaan yang mematuhi hukum dan berkinerja sesuai dengan standar keberlanjutan yang relevan. Kabupaten diminta untuk membuat daftar putih ketika kabupaten secara keseluruhan tidak diklasifikasikan sebagai risiko rendah.

Konsep-konsep tersebut akan memungkinkan upaya pelacakan disesuaikan dengan profil kabupaten, yang bertujuan menyederhanakan uji tuntas: operator berisiko dilacak di kabupaten berisiko rendah dan operator yang bertanggung jawab akan dilacak di kabupaten yang lainnya.

Daftar/registri kabupaten

Secara ideal, kabupaten harus mendaftarkan semua produsen yang beroperasi di dalam wilayahnya, termasuk produsen, pabrik, dan penghancur skala besar, menengah dan kecil. Dalam praktiknya, data produsen tersebut terbatas, baik data spasial maupun data yang lain, terutama data produsen skala kecil seperti petani kecil swadaya. Tergantung pada tingkat risiko yang ditetapkan, akan diterapkan persyaratan yang berbeda untuk kabupaten-kabupaten yang bersangkutan. Kabupaten berisiko rendah hanya akan diminta untuk menyelenggarakan daftar perusahaan skala menengah dan besar. Namun, kabupaten lain akan membutuhkan database yang komprehensif termasuk petani kecil.

Tingkat pengungkapan

Meskipun semua kabupaten akan diwajibkan untuk menyelenggarakan daftar dan data tentang produsen dan status kinerja mereka pada berbagai tingkatan, tingkat pengungkapan publik yang diusulkan akan berbeda sesuai dengan status risiko.

Kabupaten berisiko rendah hanya akan diminta untuk mempublikasikan daftar perusahaan bermasalah (daftar hitam). Kabupaten yang lain akan diminta untuk memberikan pengungkapan penuh tentang perusahaan yang beroperasi di kabupaten yang bersangkutan dan kinerja mereka (termasuk daftar putih).

Kesimpulan

Sistem Terpercaya memberikan dukungan potensial bagi perusahaan untuk membuat keputusan tentang pengadaan bahan dari sumbernya berdasarkan informasi yang lebih baik dalam konteks adanya desakan yang semakin gencar untuk memastikan bahwa komoditas adalah legal dan bebas deforestasi. Identifikasi kabupaten berisiko rendah dan mewajibkan uji tuntas yang lebih tinggi di kabupaten yang lainnya akan dapat memberikan panduan kepada pembeli dalam membuat keputusan untuk mengadakan bahan dari sumbernya (sourcing). Selain memberikan informasi kepada para operator dalam melakukan uji tuntas, hal tersebut juga dapat memandu mereka dalam memberikan dukungan bagi pemasok dan kabupaten tempat mereka mendapatkan sumber komoditas.

Kendati demikian, perusahaan pemasok yang memiliki perkebunan di kabupaten yang tidak dianggap berisiko rendah akan membutuhkan panduan yang jelas tentang cara membuktikan keberlanjutannya. Bukti-bukti tersebut dapat didasarkan pada sistem-sistem yang ada seperti ISPO dan RSPO, alih-alih menentukan persyaratan baru. Akhirnya, penilaian risiko tersebut harus dipertimbangkan melalui lensa perbaikan secara terus-menerus, di mana kabupaten yang berkomitmen memiliki kesempatan dan diberi dukungan yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan mereka dan sebagai imbalannya menerima manfaat positif.



Sistem Terpercaya merupakan salah satu alat untuk menginformasikan risiko deforestasi produksi komoditas

Endnotes

- ¹ Busch, J. & Amarjargal, O. Authority of Second-Tier Governments to Reduce Deforestation in 30 Tropical Countries. *Front. For. Glob. Change* 3, (2020)
- ² Seymour, F. J., Aurora, L. & Arif, J. The Jurisdictional Approach in Indonesia: Incentives, Actions, and Facilitating Connections. *Front. For. Glob. Change* 3, (2020); also Essen, M. von & Lambin, E. F. Jurisdictional approaches to sustainable resource use. *Front. Ecol. Environ.* n/a, (2021).
- ³ Wolosin, M. WWF Discussion Paper: Jurisdictional approaches to zero deforestation commodities. https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_jurisdictional_approaches_to_zdcs_nov_2016.pdf (2016).
- ⁴ Boshoven, J. et al. Jurisdictional sourcing: Leveraging commodity supply chains to reduce tropical deforestation at scale. A generic theory of change for a conservation strategy, v 1.0. *Conserv. Sci. Pract.* 3, e383 (2021).
- ⁵ Ibid.
- ⁶ RSPO. RSPO Jurisdictional Approach Piloting Framework. <https://www.rspo.org/resources/archive/1581> (2021).
- ⁷ Tiga komponen dasar uji tuntas adalah: informasi, penilaian risiko dan mitigasi risiko.
- ⁸ Sebagai contoh, lihat “FSC dumps palm oil giant Korindo amid rights, environmental issues in Papua” <https://news.mongabay.com/2021/07/fsc-dumps-palm-oil-giant-korindo-amid-rights-environmental-issues-in-papua/>, dan “New deforestation revealed as Indonesian minister arrives in EU to defend palm oil industry” <https://www.greenpeace.org/international/press-release/16194/new-deforestation-revealed-as-indonesian-minister-arrives-in-eu-to-defend-palm-oil-industry/>
- ⁹ Sebagai contoh, lihat “The Chain: Astra International’s mine expansion threatens forest and Astra Agro Lestari’s NDPE supply chain access” <https://chainreactionresearch.com/the-chain-astra-internationals-mine-expansion-threatens-forest-and-astra-agro-lestaris-ndpe-supply-chain-access/>, dan “Several large Indonesian palm oil companies also have risky mining businesses” <https://chainreactionresearch.com/report/indonesian-palm-oil-mining-deforestation/>

Gambar sampul: Peta Indonesia.

Informasi lebih lanjut di: info.terpercaya@efi.int

Sanggahan

Publikasi ini dibuat dengan dukungan keuangan dari Uni Eropa. Isinya adalah tanggung jawab penuh dari proyek KAMI European Forest Institute dan belum tentu mencerminkan pandangan Uni Eropa.

Uraian singkat ini didasarkan pada kertas kerja, yang tersedia berdasarkan pada permintaan. Kertas kerja lengkap belum diedit dan berfungsi sebagai penyedia informasi latar belakang. Tanggung jawab atas informasi yang terdapat di dalamnya sepenuhnya ada pada para penulis.



Funded by
the European Union